

Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Pariwisata di Pantai Liman Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan

Rex Tiran*, Frans W. Muskanan, Ambrosius D.A Sinu, Philips Y.N Ndoda, Yohanes J.K.M.M Siwi, Maria A. Mere, Valentino Gedo

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Nusa Cendana

*Korespondensi: tiranrex29@gmail.com

Abstrak

Desa sebagai salah satu pilar pembangunan di wilayah desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai aspek utama dalam mendukung pembangunan di desa. Pengembangan pariwisata desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat haruslah berlandaskan pada pendekatan pembangunan pariwisata berbasis Community Based Tourism (CBT). Dalam pendekatan ini partisipasi masyarakat adalah pondasi utama pengembangan pariwisata sehingga masyarakat bukan lagi objek pembangunan tetapi subjek utama dari pembangunan pariwisata. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan diskusi bersama pemerintah desa dan masyarakat desa Uitiuhtuan. Hasil yang dicapai adalah masyarakat disadarkan untuk turut memberi perhatian dan partisipasi terkait pembangunan pariwisata di pantai Liman. Sumber daya manusia akan dipersiapkan untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perhotelan di desa Uitiuhtuan. Masyarakat tidak akan menjual tanah kepada para investor sehingga kewenangan masyarakat untuk mengontrol dan menikmati pariwisata tetap ada untuk mencegah privatisasi wilayah pariwisata pantai Liman. Program Studi Ilmu Politik akan menjadikan Desa Uitiuhtuan sebagai desa binaan untuk mengawal pengelolaan dan pembangunan pariwisata Pantai Liman.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Masyarakat, Pariwisata, Pendekatan Community Based Tourism (CBT)

Abstract

The village as one of the pillars of development in the village area must prioritize community participation as the main aspect in supporting development in the village. Village tourism development to support community welfare must be based on a Community Based Tourism (CBT)-based tourism development approach. In this approach community participation is the main foundation of tourism development so that the community is no longer the object of development but the main subject of tourism development. The implementation of community service activities is carried out using the method of socialization and discussion with the village government and the Uitiuhtuan village community. The results achieved were that the community was made aware to also pay attention and participate in tourism development on the Liman beach. Human resources will be prepared to support tourism and hospitality activities in Uitiuhtuan village. The community will not sell land to investors so that the community's authority to control and enjoy tourism remains to prevent privatization of the Liman beach tourism area. The Political Science Study Program will make Uitiuhtuan Village a fostered village to oversee the management and development of Liman Beach tourism.

Keywords: Capacity Building, Community, Tourism, Community Based Tourism (CBT) Approach

Submit: Agustus 2023

Diterima: September 2023

Publis: November 2023



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, democratizing dan empowering, dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah

Salah satu upaya yang dapat menunjang kemajuan desa adalah melalui pengembangan kawasan pariwisata bagi desa yang memiliki potensi wisata. Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan atau usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, untuk menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani wisatawan. Kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari angkutan, akomodasi, atraksi wisata,

makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan dan lain-lain. Usaha ini untuk mendorong dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga memungkinkan perekonomian dalam negeri semakin maju dan berkembang (Yoeti, 2002:45).

Pengembangan desa berbasis masyarakat (Community Based Tourism-CBT) merupakan model pengembangan wisata yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata. CBT menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Desa wisata menjadi salah satu bentuk penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan sesuatu yang baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri.

Menurut Priasukamana dan Mulyadi (Priasukamana dan Mulyadi; 2001:78) desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen

kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (2003:25) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan dan memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik bisa diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan penggerak utama kegiatan desa wisata. Desa Uitiuhtuan adalah salah satu desa yang berada di Pulau Semau khususnya di Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Pulau Semau termasuk dalam wilayah Kabupaten Kupang NTT, Indonesia. Pulau Semau memiliki beberapa objek wisata khususnya pantai yang cukup terkenal. Salah satunya adalah objek wisata Pantai Liman. Pantai Liman terletak di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Jarak dari pusat Kota Kupang menuju Pantai Liman kurang lebih 30 km dengan tempo waktu kurang lebih 1 jam dalam perjalanan, dengan menggunakan transportasi laut dan transportasi darat. Transportasi laut menggunakan kapal Ferry atau Perahu dari Kupang ke Pelabuhan Hansisi Semau dan dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan motor atau mobil untuk bisa sampai ke Pantai Liman.

Pantai Liman memiliki potensi wisata yang unik dan menarik, seperti alam pantai yang sangat asri dengan bentangan pasir putihnya yang panjang. Selain itu, pantai ini juga terdapat sebuah bukit kecil di tepi pantai, yang merupakan tempat yang sangat strategis untuk melihat keindahan keseluruhan pantai Liman dari ketinggian, dan juga dapat melihat pantai

Lhaen Ana tepat berada dibagian selatan Bukit Liman, bukit ini tepatnya berada ditengah-tengah kedua pantai ini dan inilah yang menambah kesan indah karena tidak hanya melihat satu pantai tapi dua pantai sekaligus.

Walaupun sudah memiliki objek wisata yang menarik, Pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat desa Uitiuhtuan. Contohnya, resort atau penginapan disekitar pantai merupakan aset pariwisata yang dapat menunjang kebutuhan dan kepuasan wisatawan. Namun, pengembangan desa wisata tidak berpihak pada masyarakat lokal, karena masyarakat sejauh ini masih tetap menjadi penonton sementara investor dari luar misalnya swasta mendapat keuntungan dari aktivitas pariwisata ini. Padahal, masyarakat lokal pun menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya pariwisata desa wisata Uitiuhtuan ini. Permasalahan ini hakekatnya merupakan bentuk dari kurang dipahaminya pengembangan desa wisata yang mengakomodir peran masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam total proses pengembangannya dan memiliki hak untuk menerima manfaat dari kebijakan pengembangan desa wisata.

Selain itu, adapula kelemahan yang melekat di lokasi wisata ini, yakni dilihat dari kondisi aksesibilitas (jalan) yang kurang baik, dan juga pengeloan sarana masih sangat minim seperti belum adanya Kafe, Rumah makan, Bar, Agen perjalanan wisata dan lain sebagainya. Masalah tersebut tentu akan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Liman, baik dari segi atraksi (tarian adat), amenitas (Rumah makan dll) hingga pada partisipasi masyarakat lokal. Dalam pengembangan suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), masyarakat memiliki peran yang sangat penting sehingga proses

pengembangannya dapat berjalan dengan baik.

2. Metode Pelaksanaan

Permasalahan yang dialami warga masyarakat Desa Uitiuhtuan dalam proses pengelolaan sumberdaya alam pariwisata pantai Liman adalah: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keterlibatannya dalam keseluruhan proses pengelolaan pariwisata pantai Liman; 2) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa pariwisata berbasis masyarakat di pantai Liman sehingga masyarakat tidak mengembangkan potensi yang ada.

Dalam kaitannya dengan Penguatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam pariwisata di pantai Liman Desa Uitiuhtuan diperlukan metode yang relevan dan didasarkan pada persoalan yang sudah diuraikan di atas. Adapun metode yang digunakan adalah : Memberikan sosialisasi yang bersifat interaktif bagi masyarakat Desa Uitiuhtuan. Serta membuka ruang diskusi bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Desa mitra akan dijadikan sebagai desa binaan dalam upaya untuk memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan kawasan pariwisata, maka masyarakat harus dapat berperan aktif bersama pemerintah desa untuk selalu bekerja sama mengawal setiap pembangunan yang berlangsung di desa.

Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang memiliki beberapa tempat wisata pantai yang selalu menarik kunjungan para wisatawan untuk berwisata disana. Selain keadaan pantai yang masih asri dan menawarkan keindahan alam melalui bentangan pasir

putihnya. Salah satu pantai yang sering diminati oleh para wisatawan adalah pantai Liman.

Upaya yang kami lakukan sebagai akademisi dan mahasiswa untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat agar tidak menjual tanah mereka yang berada di sekitaran bibir pantai Liman. Beranjak dari beberapa lokasi pariwisata di NTT, banyak warga masyarakat yang menjual tanah mereka kepada para investor baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga terjadi privatisasi tempat wisata dan masyarakat tidak memiliki akses untuk dapat melaksanakan kegiatan ekonomi mereka di kawasan pantai tersebut.

Penduduk masyarakat desa Uitiuhtuan berjumlah 208 KK, dengan jumlah 828 jiwa. Latar belakang ekonomi mereka adalah sebagai nelayan, petani dan peternak. Untuk pekerjaan nelayan dan peternak adalah pekerjaan tetap dan untuk petani tergantung pada musim hujan. Sejauh ini pengelolaan wisata di Pantai Liman masih dikelola secara lokal, dan kami meyakini bahwa akan menjadi bagian destinasi wisata yang tidak kalah terkenalnya dengan tempat wisata di NTT lainnya, seperti Labuan Bajo dan Pantai Nemberala.

Bentuk sosialisasi yang kami lakukan adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat Desa Uitiuhtuan terkait pendekatan pembangunan pariwisata *Community Based Tourism (CBT)* yang menekankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak langsung) dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politik melalui kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam pembagian keuntungan dan kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Gagasan tersebut

sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang sering kali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata (Hausler 2005:32).

Untuk itu ada beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu:

- Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri Pariwisata;
- Mengikuti sertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- Mengembangkan kebanggaan komunitas;
- Mengembangkan kualitas hidup komunitas;
- Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal;
- Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas;
- Menghargai pemberdayaan budaya dan martabat manusia;
- Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas;
- Berperan dalam menentukan presentasi pendapatan yang ada di komunitas.

Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Meski dalam prinsip dasar yang disampaikan Suansri lebih memfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi ide utama yang disampaikan Suansri dalam prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal.

Sebagai tindak lanjut Suansri (2003:21-22) Menyampaikan point-point yang merupakan aspek utama pengembangan wisata berbasis masyarakat berupa 5 dimensi yaitu:

- a) Dimensi ekonomi dengan indikator berupa adanya dana untuk

pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

- b) Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
- c) Dimensi lingkungan dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
- d) Dimensi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hal-hal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.
- e) Dimensi Sosial, dalam kegiatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan kerja sama serta keterlibatan dari masyarakat.

Dari beberapa gagasan yang disampaikan oleh para ahli diatas merupakan fondasi utama agar masyarakat terlibat aktif secara berkelanjutan dalam mendukung pengembangan wisata di pantai Liman. Konsep CBT sebagai pendekatan pembangunan pariwisata mengarahkan kita untuk selalu mengedepankan hak-hak masyarakat lokal ketimbang keuntungan yang akan diraih. Karena seyogyanya target utama dalam pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi yang dimiliki desa dalam hubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Konsep CBT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

dapat memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih baik dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah desa harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pariwisata dan perhotelan, anak-anak muda harus didorong untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke ilmu yang berhubungan dengan pariwisata dan perhotelan.

Desa sebagai unit pemerintahan harus memiliki Peraturan Desa yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata agar kelak ketika investor berdatangan maka mereka tidak semenah-menahnya melaksanakan pembangunan tanpa aturan yang ada di desa karena peraturan desa akan menjadi sebuah patokan atau aturan main yang harus di sepakati oleh para investor. Peraturan tersebut sebagai bentuk kontrak sosial jikalau investor ingin membangun hotel atau tempat penunjang pariwisata lainnya. Upaya lainnya yang kami lakukan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di desa Uitiuhtuan adalah membentuk lembaga intermediary untuk menghubungkan antara Pemerintah (desa, daerah dan nasional), Kepentingan Masyarakat dan Pasar (investor). Keberadaan lembaga ini memiliki posisi strategis untuk membangun komunikasi antar *stake holder*.

Lembaga intermediary di desa Uitiuhtuan sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi selalu dilibatkan sebagai aktor subjek dalam pembangunan. Masyarakat pun memiliki hak yang sama untuk mengawal perencanaan, proses dan output dari pembangun pariwisata di Pantai Liman.

4. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan di desa Uitiuhtuan dengan judul Penguatan

Kapasitas Masyarakat Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Pantai Liman Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan, maka kesimpulan yang kami dapatkan adalah:

- a. Program Studi Ilmu Politik akan menjadikan Desa Uitiuhtuan sebagai desa binaan untuk mengawal pengelolaan dan pembangunan pariwisata.
- b. Pemerintah desa dan masyarakat menerima dan ingin menerapkan pendekatan pembangunan pariwisata *Community Based Tourism (CBT)* dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Liman.
- c. Pemerintah Desa akan membuat peraturan desa terkait pariwisata di desa Uitiuhtuan.
- d. Pemerintah desa dan Masyarakat setempat bersepakat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata dan perhotelan.
- e. Masyarakat tidak akan menjual tanah mereka kepada investor.

Referensi

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia 2009.
- Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. Jakarta
- Fandeli, Chafid. 2002. Perencanaan Kepariwisata Alam. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksusmur, Yogyakarta
- Garrod, B., 2001. Local Partisipation in the Planning and Management of Ecotourism. Bristol: University of the West of England

- Gunn CA, 1994. *Tourism Planning Basic Concepts Cases*. Washington: Taylor and Francis
- Neil, J., dan Wearing, S., 1999. *Ecotourism; Impacts, Potentials and Possibilities*. Oxford: Reed Educational and Profesional Publisihing Ltd
- Nuryanti W. 1993. *Concept, Perspektive and challenges*, makalah bagian dari Laporan Konfrensi International mengenai Pariwisata Budaya. Gadjah Mada University. Jogjakarta
- Pearce, D. 1995. *Tourism a Community Approach*. 2nd: Harlow Longman. Washington, D.C Island Press
- Pendit, Nyoman. 2000. *ILmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- Randolph J. 2004. *Environmental Land Use Planning and Management*. Washington, D.C Island Press
- Suansri P., 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project
- Sunaryo, B., 2013. *Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta :Gava Media
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2017
- Wearing, S.L. and Donald. Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-thinking the Relationship between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*